

ANALISIS KINERJA KEUANGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN VALUE FOR MONEY PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU

Nita Mulyaningsih; Reni Farwitawati; Indarti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning

Jln. D.I. Panjaitan KM 8 Rumbai Pekanbaru

E-mail : renifarwitawati@unilak.ac.id

diterima: 07/05/2023; direvisi: 05/06/2023; diterbitkan: 31/07/2023

Abstract: The public sector budget is a financial plan for the future which generally covers a period of one year and is expressed in monetary units. Budgeting in public sector organizations can help achieve accountability. The purpose of this study is to determine the financial performance of the Pekanbaru City Women's Empowerment and Child Protection Agency based on Value For Money. The type of data used in this research is quantitative data in the form of a budget realization report for 2018 to 2020. For 3 (three) consecutive years almost all activities are said to be economical because they are able to save costs in carrying out their activities, but there are also some activities that waste costs, namely the work program for improving the quality of life and protection of women with an economic ratio of 103.49%. Based on the results of the research on the efficiency ratio in 2018, almost all of them were declared efficient but there was 1 (one) program that was inefficient in implementing its work program, then in 2019 out of 4 (four) work programs there were 2 work programs that were inefficient with an efficiency ratio below 100 %, then in 2020 all work programs are said to be inefficient because they have an achievement percentage below 100%. Furthermore, in 2018 all work programs were said to be effective, then in 2019 there was 1 (one) work program that was ineffective because it did not reach the set target, namely the Program for Increasing Participation and Gender Equality in Development, then in 2020 there would only be 1 (one) programs that fall into the effective criteria and the rest are declared ineffective due to the Covid-19 pandemic which has hampered all budgeted activities.

Keywords: *Financial Performance, Budget Realization Report, Value For Money*

PENDAHULUAN

Sektor publik memiliki peran yang tidak kecil dalam suatu negara yang dapat berdampak pada sektor yang lain yaitu sektor swasta maupun sektor sosial. Oleh karena itu, untuk kemajuan ekonomi, sosial, politik, dan budaya bangsa maka pembangunan sektor publik harus terus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh diabaikan. Salah satu perencanaan dan pengendalian yang memiliki instrumen penting yaitu anggaran. Anggaran sektor publik merupakan perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter.

Penyusunan anggaran pada organisasi sektor publik dapat membantu mewujudkan akuntabilitas. Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban.

Menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan, masyarakat secara tidak langsung dapat melakukan pengawasan atau pengendalian. Hal ini karena anggaran sebenarnya dapat dijadikan standar atas

kegiatan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu penilaian kinerja yang bertujuan untuk membantu pemerintah di sektor publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan, pertama membantu memperbaiki kinerja pemerintah agar dapat berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan masyarakat. Kedua untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, yaitu didalam penggunaan ukuran kinerja sektor publik. Ketiga adalah untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo; 2013;130).

Pengukuran atas kinerja keuangan pemerintah daerah dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah pada masa yang akan datang, sebagai alat pengawasan bagi masyarakat terhadap kebijakan yang telah dipilih atas pelaksanaan anggaran daerah. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi pemerintah dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

Semakin lama organisasi sektor publik kian pesat perkembangannya, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Akan tetapi, hal tersebut mengakibatkan munculnya fenomena semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik dan adanya transparansi dari pemerintah. Selain hal tersebut, timbul tuntutan baru yaitu agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Implementasi konsep value for money dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik. Manfaat implementasi konsep value for

money pada organisasi sektor publik antara lain: (a) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik; (b) Meningkatkan mutu pelayanan publik; (c) Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input; (d) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; (e) Meningkatkan kesadaran akan uang.

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis, pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah. Ekonomis merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi, pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk pencapaian output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/ input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektifitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Bahkan, untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (equity & service coverage). Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output, karena output yang dihasilkan tidak selalu berupa output yang berwujud, akan tetapi lebih banyak berupa intangible output.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,. Setiap perangkat daerah memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru tidak memiliki pendapatan sehingga anggaran pendapatan tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat, anggaran yang telah ditetapkan hanya anggaran belanja yang diperuntukkan untuk kegiatan dan program-program yang akan dicapai. Adapun target dan realisasi belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Data Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2018 – 2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase Pencapaian
2018	7.243.402.446	6.671.981.744	92,11%
2019	8.190.993.283	8.012.022.794	97,82%
2020	7.935.349.142	7.201.237.225	90,75%

Sumber: Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui persentase pencapaian anggaran belanja berfluktuasi setiap tahunnya, dimana pada tahun 2019 terjadi kenaikan persentase realisasi anggaran belanja dan pada tahun 2020 terjadi penurunan persentase pencapaian anggaran belanja. Tahun 2019 terjadi kenaikan persentase realisasi anggaran sebesar 5,71% lalu pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 7,07%. Penurunan pencapaian realisasi anggaran belanja pada tahun 2020 disebabkan adanya kendala dalam pelaksanaan program kerja 2019 dan 2020, salah satu kendala yang terjadi yaitu adanya wabah Covid-19 sehingga sebagian program kerja yang telah dianggarkan tidak terlaksana sebagai bentuk pencegahan penularan Covid-19 oleh pemerintah.

Tidak terpacainya anggaran belanja yang telah ditetapkan dapat memberikan penilaian yang kurang baik atas kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sehingga diperlukan sebuah analisis untuk menilai kinerja keuangan dengan menggunakan pendekatan *Value For Money*. Analisis kinerja keuangan dengan pendekatan *value for money* menggunakan anggaran belanja sebagai tolak ukur penilaian kinerja, dimana setiap perangkat daerah sebaiknya dapat mencapai target dari APBD yang telah dianggarkan. Dengan adanya analisis *value for money* pihak instansi dapat melihat sejauh mana tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan realisasi anggaran penerimaan dan belanja daerah, sehingga nantinya dapat memberikan gambaran mengenai kebijakan-kebijakan yang dapat memaksimalkan realisasi anggaran belanja.

Untuk melakukan pengukuran atas kinerja keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dapat digunakan metode *Value for money*. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Khusus untuk perangkat daerah yang tidak memiliki anggaran pendapatan, pengukuran kinerja dengan elemen ekonomis tidak digunakan, hal ini disebabkan karena tidak adanya acuan yang akan diperhitungkan dalam pengukuran kinerja secara ekonomis tersebut, sehingga pengukuran yang digunakan hanya efisiensi dan efektivitas. Dengan menggunakan analisis ini dapat diketahui pencapaian persentase kinerja beserta pengukuran baik atau buruknya kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru tahun 2018 sampai dengan 2020.

Penelitian dengan judul yang sama telah dilakukan oleh (Indrayani, Khairunnisa, 2018) yang menyatakan bahwa Secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe telah efisien, yang berarti

bahwa pemerintah mampu menggunakan sumber daya yang diperlukan dengan minimum untuk mencapai target yang maksimum. Karena, suatu organisasi akan di katakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% atau semakin kecil rasio yang diperoleh, maka kinerjanya semakin efisien, Rasio efektifitas pada Pemerintah Kota Lhokseumawe periode 2014-2016 dengan nilai rasio 96,53%, 86,65%, 76,98% rasio efektifitas yang bernilai <100% menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun tersebut dinilai tidak efektif.

Selanjutnya penelitian ini dilakukan oleh (Agustin, 2017) dengan judul penelitian “Konsep *Value For Money* Dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor Publik”. Menurut hasil analisis dan pembahasan mengenai LAKIP pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Ditinjau dari segi ekonomi, Berdasarkan kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya selama tahun 2015 secara keseluruhan dapat dikatakan ekonomis.. Ditinjau dari segi efisien, Berdasarkan kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya selama tahun 2015 secara keseluruhan dapat dikatakan cukup efisien. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian suatu kegiatan atau program jika mampu menghasilkan *output* tertentu dengan hasil yang sebesar-besarnya dengan menggunakan *input* (anggaran) yang serendah-rendahnya. Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Pendekatan *Value For Money* pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Berdasarkan *Value For Money*?”

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas. Menurut (Mulyadi;2016;416) Kinerja Keuangan merupakan manifestasi keberhasilan atau kegagalan yang terjadi di kinerja operasional. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pengukuran Kinerja Keuangan merupakan manifestasi keberhasilan dan kegagalan kinerja operasional sehingga menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Penilaian kinerja berdasarkan value for money menurut Mahmudi (2016:81) adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program dan organisasi. Pengukuran kinerja value for money merupakan bagian terpenting setiap pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Karena pemerintah sebagai wakil rakyat yang dipercaya untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Negara harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengukur sampai sejauh mana akuntabilitas pemerintah dalam membelanjakan dana publik apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Value for money merupakan penghargaan terhadap nilai uang dan

merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Pengertian *value for money* menurut Bastian (2016:335) merupakan konsep yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pengukuran kinerjanya. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Berdasarkan ketiga elemen tersebut organisasi dapat mengukur tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang di hasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut (Mahmudi, 2016:22). Sedangkan menurut (Raharjo 2014:169) mengemukakan bahwa efisiensi merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki. Secara matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input atau dengan istilah lain output per unit input. Menurut (Bastian;2017;7) efisiensi dapat diukur dengan rasio antara output dengan input. Apabila semakin besar output dibandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Secara matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per input. Berikut ini formula untuk pengukuran efisiensi:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Efisiensi merupakan salah satu bagian indikator kinerja *value for money* yang dapat diukur dengan ratio antara *output* dengan *input*. Karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi

dapat dilakukan dengan cara: (1) Meningkatkan output pada tingkat input yang sama, (2) Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar dari pada proporsi peningkatan input, (3) Menurunkan input pada tingkat output yang sama. 4. Menurunkan input dalam proporsi penurunan output.

(Mardiasmo;2014;135)

menjelaskan bahwa dalam pengukuran kinerja, efisiensi dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya *input* pada tingkat kapasitas optimal. (2) Efisiensi teknis atau manajerial Efisiensi teknis atau manajerial terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya *input* pada tingkat *output* tertentu.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan no. 158 th 2014 tentang tata cara pelaksanaan realisasi pendapatan dan belanja negara untuk capaian realisasi standarnya dapat dikatakan efektif dan efisien 90% sampai dengan 95 %.

Menurut (Handoko;2016;18) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dinyatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya menilai apakah suatu program/kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini formula pengukuran efektivitas:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan no. 158 th 2014 tentang tata cara pelaksanaan realisasi pendapatan dan belanja negara untuk capaian realisasi standarnya dapat dikatakan efektif dan efisien 90% sampai dengan 95%.

Ekonomi berarti cara menggunakan sesuatu hal secara hati-hati dan bijak agar diperoleh hasil yang baik. Ekonomi didefinisikan sebagai pemerolehan input

dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter (Bastian, 2017). Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah. Untuk mengetahui besarnya tingkat ekonomis maka dibandingkan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran yang dikalikan dengan 100%.

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Berdasarkan peraturan Menteri keuangan no. 158 th 2014 tentang tata cara pelaksanaan realisasi pendapatan dan belanja negara untuk capaian realisasi standarnya dapat dikatakan ekonomi 90% sampai dengan 95%.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif menurut Sugiyono (2016;23) adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif penelitian ini berupa laporan realisasi anggaran belanja tahun 2018 sampai dengan 2020

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer. Menurut Sugiyono (2016;25) Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini yaitu data gambaran umum instansi dan susunan struktur organisasi, data anggaran dan realisasi belanja tahun 2018 – 2020, data-data pendukung lainnya yang berhubungan dengan penilaian kinerja keuangan

Menurut (Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 2015) yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terdapat kinerja pada Dinas Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang sudah dikatakan ekonomis dan belum ekonomis serta ekonomis berimbang, berikut merupakan hasil rangkuman perhitungan rasio ekonomis pada tahun 2018 s/d 2020:

No	Program / kegiatan	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Program Kesenjangan Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	100.00%	98.69%	32,09%
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	96.24%	98.30%	98,13%
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	97.64%	103.49%	77,06%
4	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	-	98.64%	91,88%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Berdasarkan data pada tabel 5.11 diketahui pada tahun 2018 terdapat 3 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, dari hasil penelitian tersebut diketahui jika program yang dinyatakan ekonomis atau hemat terdiri dari 2 program yaitu Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan persentase masing-masing sebesar 96,24% dan 98,64%.

Selanjutnya pada tahun 2019 dari 4 (empat) program yang dilaksanakan, terdapat 3 program yang dikatakan ekonomis selanjutnya terdapat 1 (satu) program yang memiliki persentase diatas 100% dan tidak ekonomis, selanjutnya pada tahun 2020 seluruh program kerja yang terlaksana memiliki kriteria ekonomis karena pada tahun tersebut pihak Dinas Pemberdayaan Wanita dan

Perlindungan Anak Kota Pekanbaru meminimalisir kegiatan yang dilakukan dengan adanya pandemi COVID-19, sehingga agenda yang direncanakan banyak yang tertunda.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Indrayani dan Khairunnisa, 2018) dengan judul “Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016)”. Adapun hasil penelitian menunjukkan 1. Rasio ekonomis pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe menunjukkan kinerja pemerintah daerah pada tahun 2014-2016 bernilai 86,54%, 82,64%, 71,43%, menunjukkan bahwa rasio ini bernilai ekonomis.

Sari (2014) dengan judul penelitian “Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013)”. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep tahun 2010- 2013, dengan menggunakan teknik perhitungan rasio ekonomis menunjukkan kinerja pemerintah daerah berada pada katagori ekonomis, yaitu sebesar 88,02 %, 89,98 %, 89,77 % dan 90,68%.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perhitungan rasio efisiensi pada Dinas Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, maka dapat dirangkum hasil perhitungan efektivitas sebagai berikut:

No	Program / kegiatan	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	100.00%	101.33%	79.46%
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	89.22%	101.73%	98.13%
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	102.42%	96.63%	77.06%
4	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan		57.39%	91.88%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Suatu kinerja dikatakan efisien jika memiliki rasio diatas 100%, berdasarkan tabel 5.12 pada tahun 2018 dapat dilihat hampir keseluruhan program kerja dikatakan efisien namun ada 1 (satu) program kerja yang memiliki persentase dibawah 100% yaitu program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan Anak dengan persentase sebesar 89,22%, dimana artinya terdapat biaya keluar yang besar namun hasil pencapaian atau output tidak sesuai dengan yang ditargetkan.

Selanjutnya pada tahun 2019 juga terdapat program kerja yang tidak efisien dan yang paling tinggi ketidakefisienan nya yaitu program kerja peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, dimana pada program ini sudah terlaksana namun hasil yang dicapai tidak maksimal sesuai dengan target yang diinginkan, selanjutnya terdapat juga kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana karena keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) yang tidak memiliki soft skill yang dibutuhkan sehingga program tersebut dikatakan tidak efisien.

Pada tahun 2020, seluruh program kerja dikatakan tidak efisien karena pada tahun tersebut terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan tertundanya beberapa program kerja yang telah disusun, sehingga pencapaian program tidak maksimal, selain itu pada tahun tersebut juga terjadi kendala dalam pencairan dana anggaran belanja dimana pemerintah pusat membatasi penggunaan dana anggaran dan mengalihkan dana tersebut anggaran penanganan Covid-19.

Penelitian yang dilakukan oleh Meri (2013) mengatakan jika value for money dalam penelitian ini dapat dikategorikan tidak ekonomis, tidak efisien dan tidak efektif. Pertama, tidak ekonomis karena setiap tahunnya perhitungan anggaran tersebut meningkat. Pada tahun 2010 jumlah anggaran Rp142.789.704.382.000, lalu tahun 2011 menjadi Rp 164.906.168.411.000, kemudian tahun 2012 mengalami kenaikan

lagi Rp 209.834.161.868.000 itu berarti adanya pemborosan, perusahaan tidak mampu menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Lalu kedua, tidak efisien karena realisasi anggaran lebih besar dari anggaran perusahaan, dilihat dari persentase perbandingan, jika persentase lebih dari 100% maka realisasi anggaran lebih besar dari anggaran dan sebaliknya. Pada tahun 2010 mencapai 129,67% , lalu tahun 2011 menjadi 122,53%, dan tahun 2012 menjadi 111,17%. Kemudian yang terakhir, tidak efektif karena tidak mencapai sasaran atau misi perusahaan itu sendiri yaitu mengutamakan mutu dan pelayanan demi kepuasan masyarakat.

Kadafi (2013) menunjukkan bahwa tingkat ekonomi dan efisiensi telah tercapai, Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjung pinang dapat mencapai hasil yang sangat efisien dan ekonomis. Namun, tingkat efektivitas program masih kurang sehingga dapat disimpulkan efektivitas dari program – program yang langsung menyentuh masyarakat sudah maksimal.

Pada sub bab sebelumnya telah dilakukan perhitungan rasio efektivitas setiap tahunnya dengan hasil rekap sebagai berikut:

No	Program / kegiatan	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	100.00%	100.00%	109.16%
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116.47%	100.00%	98,13%
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	100.00%	100.00%	77,06%
4	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan		58.53%	91,88%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel 5.13 pada tahun 2018 seluruh kegiatan kerja pada Dinas Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Wanita Kota Pekanbaru dikatakan efektif dengan pencapaian kinerja diatas 100%, dimana seluruh kegiatan yang dilakukan telah mencapai target yang telah ditetapkan dan artinya kinerja Dinas Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan

Anak Kota Pekanbaru pada tahun 2018 telah baik.

Pada tahun 2019 terdapat 1 (satu) program yang tidak efektif karena tidak dilaksanakannya seluruh kegiatan yang direncanakan sehingga hasil pencapaian kinerja juga menurun yang menyebabkan kinerja tidak efektif. Pada tahun 2020 hanya terdapat 1 program kerja yang memiliki kriteria efektif, hal tersebut terjadi karena kegiatan dilakukan sebelum terjadinya pandemi sehingga Dinas Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dapat memaksimalkan pelaksanaan kegiatan tersebut dan mampu mencapai target yang telah ditentukan. Dari program dan kegiatan yang dijabarkan diatas, terdapat beberapa kegiatan yang realisasi keuangan dibawah 90%, secara umum kondisi tersebut antara lain disebabkan : (1) Pencapaian tujuan dan sasaran program sering menjadi tidak maksimal, karena proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kurang didefinisikan secara tepat. (2) Dalam menyusun rencana pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan sering kali kurang memperhatikan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja. (3) Terjadi penghematan anggaran karena realisasi kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. (4) Kapasitas keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru belum optimal sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran.

Namun secara keseluruhan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sudah mampu menyelesaikan program dan kegiatan yang diamanatkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun (DPAP) Tahun 2020 dengan capaian persentase sebesar 87.53% walaupun nilai tersebut belum efektif.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Agustin, 2017) ditinjau dari efektivitas, Berdasarkan kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya selama tahun 2015 secara keseluruhan dikatakan sangat efektif. Dapat dilihat dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya melakukan banyak upaya dalam mewujudkan efektivitas kinerja. Salah satunya dengan program kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah ditarget sebesar 100% dan yang dicapai melebihi 100% yaitu 102,22%. dengan demikian outcome yang diperoleh melebihi yang ditargetkan dari tercapainya tujuan dan sasaran yang diterapkan. Sedangkan pada tahun 2014.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil peneelitan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut hampir seluruh kegiatan dikatakan ekonomis karena mampu melakukan penghematan biaya dalam pelaksanaan kegiatan nya, namun juga terdapat beberapa kegiatan yang melakukan pemborosan biaya yaitu pada program kerja Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan rasio ekonomis sebesar 103,49% pada tahun 2019.

Rasio efisiensi pda tahun 2018 hampir seluruhnya dinyatakan efisien namun terdapat 1 (satu) program yang tidak efisien dalam pelaksanaan program kerjanya, selanjuta pada tahun 2019 dari 4 (empat) program kerja terdapat 2 program kerja yang tidak efisien dengan rasio efisiensi dibawah 100%, selanjutnya pada tahun 2020 seluruh program kerja dikatakan tidak efisien karena memiliki persentase pencapaian dibawah 100%.

Pada tahun 2018 seluruh program kerja dikatakan efektif, selanjutnya pada tahun 2019 terdapat 1 (satu) program kerja

yang tidak efektif karena tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, selanjutnya pada tahun 2020 hanya terdapat 1 (satu) program yang masuk kedalam kriteria efektif dan selebihnya dinyatakan tidak efektif karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabka terkendalanya seluruh kegiatan yang telah dianggarkan.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut: Sebaiknya pada Dinas Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru lebih memaksimalkan SDM (sumber daya manusia) agar seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik`

Sebaiknya pada Dinas Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru memaksimalkan *output* dari setiap program yang telah dianggarkan terutama program pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan anak agar untuk tahun-tahun berikutnya memiliki pencapaian yang baik.

Sebaiknya Dinas Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru melakukan Analisa dan *review* atas anggran yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan pada Dinas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- F.R. (2017). Analisis Kinerja Pemerintah Propinsi Riau Berdasarkan Value For Money Audit. (Program Studi Magister Akuntansi Pasca Sarjana Univ. Riau). Jurnal Ekonomi
- Agustin, R. D. (2017). Konsep Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor Publik. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.
- Bastian, I. (2017). Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua. Jakarta: Univ Terbuka.
- Handoko, T. H. (2016). Manajemen . Yogyakarta : BPEE.
- Indrayani, Khairunnisa. (2018). Analisis Pengukuran Kinerja Dengan

- Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* .
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Ketiga* . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik* . Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta: Andi Yogyakarta.
- Mulyadi. (2016). *Akuntansi Biaya Edisi Kelima* . Yogyakarta: Penerbit STIM YKPN .
- Raharjo, A. (2014). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* . Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rusydah, A. L. (2016). *Penerapan Konsep Value For Money Dalam Menilai Kinerja Pelayanan Publik*. *Jurnal Akuntansi* .
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.